

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat, pendidikan memegang peranan penting dalam rangka menentukan eksistensinya dan perkembangan masyarakat tersebut. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan suatu usaha melestarikan, mengalihkan dan mentransformasikan nilai-nilai kebudayaan dalam segala aspeknya dan jenisnya kepada generasi penerus. Demikian pula halnya dengan pendidikan Islam di kalangan umat Islam, ia merupakan salah satu bentuk manifestasi dari cita-cita hidup Islam untuk melestarikan, mengalihkan dan menanamkan nilai-nilai Islam tersebut kepada pribadi generasi penerusnya. Sehingga nilai-nilai kultural religius yang dicita-citakan dapat tetap berfungsi dan terus berkembang dalam masyarakat dari waktu ke waktu.

Dalam sejarahnya, pendidikan Islam berkembang seiring dengan munculnya agama Islam itu sendiri. Pada masa perkembangan Islam itu, tentu saja pendidikan yang bersifat formal dan sistematis belum dilaksanakan. Pendidikan formal Islam muncul dengan adanya kebangkitan madrasah/lembaga pendidikan Islam, itupun hanya beberapa abad setelah perkembangan Islam.¹

¹ Zakiah Daradjat, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 51.

Meskipun dalam keadaan yang termasuk informal, akan tetapi berbagai kelompok masyarakat tetap mengusahakan agar terlaksana pendidikan demi kepentingan mereka dan masa depan generasinya. Mereka senantiasa memberikan pengetahuan dan wawasan ke-Islaman kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, begitu pula dengan berbagai kebudayaan, pandangan dan nilai-nilai yang dianggap baik oleh suatu masyarakat diusahakan untuk diwariskan, dan usaha untuk itu yang diutamakan adalah melalui pendidikan.²

Pendidikan Islam yang sudah terorganisasi dan melembaga tampak dalam berbagai bentuk yang bervariasi. Dari yang sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan rumah, surau, mushalla, mesjid dan lainnya untuk tempat belajar, sampai dengan menggunakan wadah yang lebih kondusif seperti gedung dan ruangan khusus untuk belajar. Terakhir ini, muncul suatu lembaga pendidikan agama Islam yaitu pondok pesantren.

Pondok pesantren sangat kondusif bagi pembelajaran dan proses pendidikan Islam, baik itu pendidikan formal maupun yang semi formal, yang jelas adalah bahwa lembaga seperti ini sangat diperlukan sebagai tempat murid-murid menerima ilmu pengetahuan agama secara regular dan sistemik. Dengan adanya tempat seperti ini, lebih memudahkan interaksi antara pengajar (guru/ustadz) dengan yang diajar (murid/santri). Dengan situasi yang demikian ini lebih memudahkan pencapaian tujuan dari proses pendidikan tersebut.

Di Kalimantan Selatan, khususnya kalangan masyarakat Kabupaten Banjar, perhatian terhadap pendidikan cukup tinggi. Hal ini dapat diketahui dari

² *Ibid*, hlm. 51.

banyaknya lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat di berbagai tempat seperti di desa atau kota, dengan berbagai corak yang bersifat swasta. Lebih-lebih lagi sebelum tersebar luasnya lembaga-lembaga pendidikan oleh pemerintah.³

Adapun mengenai sejarah pendidikan Islam di Kalimantan Selatan, tidak banyak catatan yang memberikan deskripsi sehubungan dengan sejarah tersebut. Dari sekian literatur yang peneliti temukan mengenai sejarah pendidikan di Kalimantan Selatan, pada umumnya merujuk pada tokoh besar Kalimantan Selatan, yaitu, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Hal ini menurut peneliti cukup beralasan, karena sebagaimana diungkapkan Gubernur Kalimantan Selatan Drs. H.M. Sjahriel Darham yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa pada kurun waktu 1710 sampai 1821 M, sampai mendapatkan gelar “Matahari Islam dari Kalimantan” dari Menteri Agama Republik Indonesia periode 1962-1967.

Salah satu pusat lembaga pendidikan di Kalimantan Selatan berada di daerah Dalam Pagar yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan dan terletak di pinggiran kota Martapura. Dalam Pagar merupakan tempat pemukiman Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan keluarganya, di desa ini pula dia mendirikan pengajian semasa hidupnya pada

³ Laporan Seminar, *Profil Pendidikan Islam di Kal-Sel*, (Banjarmasin: t.tp, 1986), hlm. 19.

akhir abad ke-18 sampai permulaan abad ke-19.⁴ Setelah masa tersebut, di Dalam Pagar ini berkembang pengajian-pengajian yang serupa dan dipimpin oleh tuan guru masing-masing.

Kedudukan para tuan guru dalam masyarakat Banjar tradisional tergolong dominan meskipun tanpa institusi, sebagai gantinya adalah majelis pengajian. Jenis pengajian yang berkembang pada masyarakat Banjar tradisional tergantung pada orientasi tuan guru dan pada kecenderungan masyarakat yang berkembang waktu itu. Biasanya pengajian ini ada yang lebih kepada pemenuhan kebutuhan spiritual masyarakat, dan ada juga yang lebih menekankan pada keahlian dalam bidang ilmu agama, dalam hal ini seorang murid sangat dituntut keseriusan dan ketekunan dalam mendalami ilmu-ilmu agama.⁵ Pengajian tersebut dilakukan di rumah-rumah pada tuan guru dan dengan silih berganti di antara murid-murid tersebut sesuai dengan waktu yang disepakati oleh kedua pihak, antara tuan guru dan para murid dan juga sesuai dengan tingkatan kitab yang dipelajari.⁶

Perkembangan zaman yang terjadi pun mempengaruhi kegiatan pengajian-pengajian tersebut, sehingga dalam pelaksanaan lebih sistemik dan terorganisasi dengan baik dalam sebuah lembaga pendidikan yang semi formal yang kerap disebut dengan pesantren. Maksud dari pesantren itu adalah sebagaimana pendapat Sudjoko yang dikutip oleh Hasan Basri, yaitu:

Pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara nonklasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa

⁴ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 14.

⁵ Ahmad Syadzali, "Tradisi Mengaji Duduk Dalam Masyarakat Banjar" dalam *Jurnal Kebudayaan KANDIL: Melintas Tradisi*, Edisi 3, Tahun I, Desember 2003 hlm. 54.

⁶ *Ibid*, hlm. 55.

Arab oleh ulama abad pertengahan, dan para santri biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut.⁷

Dalam Pagar ini pernah terkenal sebagai desa yang mempunyai lembaga pendidikan Islam informal yang banyak melahirkan banyak ulama lokal dan regional yang terus-menerus dari masa ke masa, generasi ke generasi sampai tahun 1980-an, dan saat itu pengaruhnya masih dapat dirasakan. Baru dua puluh tahun terakhir ini, Dalam Pagar mengalami kemunduran dan nampak sangat sulit untuk bisa bangkit kembali mengulang masa keemasan ketika awal pembentukannya. Lembaga pendidikan Islam yang ada di Dalam Pagar seperti pondok pesantren Sulamul 'Ulum untuk sekarang ini sudah kalah jauh jika dibandingkan dengan pondok pesantren Darussalam yang juga berada di daerah Martapura.

Hal ini bisa dilihat dari kualitas dan kuantitas yang dihasilkan oleh kedua lembaga pendidikan Islam tersebut. Secara kualitas, lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren Darussalam masih mempertahankan pola tradisional, yakni polayang tetap mempertahankan sistem pengajian kitab klasik dan sedikit memasukkan pelajaran umum seperti bahasa asing. Sedangkan pondok pesantren Sulamul 'Ulum sudah mengembangkan pola modern, yakni berusaha mengkombinasikan antara pengajaran pengetahuan agama dengan pengajaran pengetahuan umum. Secara kuantitas pondok pesantren Sulamul 'Ulum sekarang mempunyai lebih sedikit murid. Hal ini disebabkan oleh murid yang sekolah di pondok pesantren Sulamul 'Ulum kebanyakan adalah penduduk sekitar Dalam

⁷ Hasan Basri, "Pesantren: Karakteristik dan Unsur-Unsur Kelembagaan", dalam Abuddin Nata (Editor), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), hlm. 104.

Pagar. Adapun pondok pesantren Darussalam mempunyai santri yang cukup banyak disebabkan oleh para santrinya bukan hanya penduduk berada di sekitar Pasayangan melainkan juga berasal dari luar seperti Hulu Sungai, Pagatan, Banjarmasin, bahkan sampai Kalimantan Tengah, Jawa, dan Sulawesi.

Perjalanan pendidikan Islam di Kalimantan Selatan terutama masyarakat Banjar tersebut terus berkembang hingga saat ini, termasuk pada masa pasca kemerdekaan yakni dari masa Orde Lama (1945-1966), Orde Baru (1966-1998) dan Reformasi (1998-sekarang). Pada saat ini masyarakat Banjar menjadi bagian integral dari Negara kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yang menjadi bagian dari negara Indonesia tersebut sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan pendidikan Islam di Kalimantan Selatan. Seiring dengan situasi dan kondisi sosial politik negara Indonesia.

Indonesia mengalami tiga masa, yakni Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Pada masa Orde Baru diwakili oleh sosok Soeharto merupakan masa yang paling lama dalam memimpin negara Indonesia yang termasuk didalamnya Kalimantan Selatan, yakni sejak tahun 1966-1998. Selain itu pemerintah Orde Baru menjalankan politik secara sentralistik, semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintahan di Jakarta. Dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan dan sosial budaya, peran pemerintah pusat amat menentukan⁸. Dengan karakteristik keadaan pemerintahan Orde Baru yang

⁸ Pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto diangkat sebagai presiden hal ini berdasarkan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968, lihat Ghalia Indonesia, Ketetapan-ketetapan MPR, 1983-1988, 1978-1983, Jakarta: 1986, hlm. 43, setelah itu Presiden Suharto berhasil

sentralistik tersebut memberikan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan termasuk perkembangan pendidikan Islam di Kalimantan Selatan. Kemudian muncul pertanyaan: Bagaimana respon dan keadaan masyarakat di Kalimantan Selatan pada masa Orde Baru? Bagaimana pula keadaan Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan pada masa Orde Baru? Untuk menjawab dua pertanyaan ini perlu dilakukan penelitian agar diperoleh jawaban yang realistik.

Ketika masa Orde Baru, ada beberapa kebijakan yang menjadi ciri khas atau bisa dibidang karakteristik yang menjadi ciri khas zaman Orde Baru. Pertama, bahwa pemerintahan Orde Baru adalah pemerintahan yang memiliki sifat kuat dan dominan. Kedua, pemerintahan Orde Baru merupakan pemerintahan yang kepemimpinannya dimiliki oleh kekuatan militer yang berkerja sama dengan teknokrat dan birokrat sipil serta mendapatkan dukungan penuh dari golongan yang disebutkan. Ketiga, pemerintahan Orde Baru melengkapi dirinya dengan aparat keamanan yang represif serta berbagai aparat politik-ideologis demi melestarikan dan memproduksi kekuatannya. Selanjutnya yang Keempat, sejak awal kebangkitannya, pemerintah Orde Baru sudah mendapatkan dukungan dari kapitalisme internasional.

Secara umum kebijakan pemerintahan Orde Baru terhadap pendidikan adalah sistem doktrinisasi, yaitu sebuah sistem yang memaksakan paham-paham pemerintahan Orde Baru agar mengakar pada benak anak-anak. Bahkan dari sejak Sekolah Dasar sampai pada tingkat Perguruan Tinggi diwajibkan mengikuti

memenangkan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan tahun 1998

penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang berisi tentang hapalan butir-butir Pancasila⁹. Kurikulum yang diterapkan terjadi 3 (tiga) kali perubahan. Kurikulum 1968 sifatnya perubahan dari program Pancawardhana (Kurikulum 1964) yang menitikberatkan pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keperigelan, dan jasmani, menjadi menitikberatkan pada pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Pengganti kurikulum Orde Lama ini lebih menekankan kepada kelompok pembinaan Pancasila. Sementara pelajaran inti; pelajaran ilmu hayat dan ilmu alam, digabung menjadi ilmu pengetahuan alam (IPA). Selanjutnya, Kurikulum 1975 berorientasi pada tujuan, dengan adanya tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikuler, instruksional umum, dan instruksional khusus. Selanjutnya, Kurikulum 1984 yang berorientasi pada tujuan instruksional. Selain itu, pendekatan berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif (CBSA).

Pendidikan Islam secara umum pada masa Orde Baru ini, setahap demi setahap mengalami perkembangan yang cukup signifikan, di antaranya lembaga-lembaga pesantren mulai mendirikan madrasah dalam sistem pendidikannya. Dalam sistem ini jenjang-jenjang pendidikan dibagi menjadi Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Sistem madrasah ini mendorong perkembangan pesantren sehingga jumlahnya meningkat pesat. Pada tahun 1958/1959 lahir Madrasah Wajib Belajar yang memiliki hak dan kewajiban seperti sekolah negeri. Selanjutnya, di tahun 1965, berdasarkan rumusan Seminar Pondok Pesantren di

⁹ Hal ini sebagaimana isi Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa sistem pendidikan haruslah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Yogyakarta disepakati bahwa di pondok pesantren perlu dimasukkan pelajaran keterampilan seperti: pertanian dan pertukangan¹⁰.

Pada awal-awal masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan tentang madrasah bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan Orde Lama. Pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi baru sebagai lembaga pendidikan bersifat otonom di bawah pengawasan Menteri Agama.

Pada tahun 1966 Pemerintah Orde Baru memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga universitas (TAP MPRS No.XXVII/MPRS/1966). Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, sidang umum MPRS tahun 1966 berhasil menetapkan TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 yang membahas tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pasal 1 menjelaskan

”Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri”.

Dengan demikian, sejak tahun 1966 pendidikan agama menjadi materi pelajaran wajib dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi Umum Negeri di seluruh Indonesia. Ketetapan MPRS ini diikuti dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Oktober 1967 ditetapkan bahwa Kelas I dan II SD diberikan mata pelajaran agama 2 jam per minggu, kelas III, 3 jam perminggu, kelas IV sampai VI, 4 jam perminggu.

¹⁰Pada tahun 1967 terbuka kesempatan untuk menegerikan madrasah swasta untuk semua tingkatan, Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Islam Negeri (MTsIN) dan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN). Namun ketentuan itu hanya berlangsung 3 tahun, dan dengan alasan pembiayaan dan fasilitas yang sangat terbatas, maka keluarnya Keputusan Menteri Agama No. 213 tahun 1970 tidak ada lagi penegerian bagi madrasah madrasah swasta. Namun kebijakan tersebut tidak berlangsung lama, memasuki tahun 2000 kebijakan penegerian dimunculkan kembali.

Hal itu berlaku juga pada SMP dan SMA. Ketetapan MPRS tersebut menjadi pijakan bagi penyusunan kurikulum SD, SMP, SMA, sekolah kejuruan dan perguruan tinggi, terutama menyangkut tujuan dan landasan pendidikan di masing-masing jenjang sekolah. Kurikulum SD, SMP, dan SMA yang pertama di zaman Orde Baru adalah kurikulum yang dikeluarkan pada tahun 1968 untuk SD, 1967 untuk SMP, dan SMA tahun 1968. Dalam kurikulum ini, semua mata pelajaran dibagi ke dalam tiga kelompok: Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila, Kelompok Pembinaan Pengetahuan Dasar, dan Kelompok Pembinaan Kecakapan Khusus.

Awal Orde baru yakni tahun 1967 dilakukan proses pengertian sejumlah madrasah oleh pemerintah Republik Indonesia yakni dengan membagi mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, selangkah telah terlihat kebijakan pemerintah yang berkontribusi positif terhadap pendidikan Islam.

Selain itu pada tahun 1967 terbuka kesempatan untuk menerbitkan madrasah swasta untuk semua tingkatan, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Islam Negeri (MTsIN) dan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN). Namun ketentuan itu hanya berlangsung 3 tahun, dan dengan alasan pembiayaan dan fasilitas yang sangat terbatas, maka keluarnya Keputusan Menteri Agama No. 213 tahun 1970 tidak ada lagi penegerian bagi madrasah madrasah swasta.

Namun pada tahun 1972 terjadi reaksi keras terhadap sikap pemerintah yang mendiskriminasikan madrasah, karena Keputusan Presiden No. 34 Tahun

1972, yang kemudian diperkuat dengan Intruksi Presiden No. 15 Tahun 1974. Saat ini madrasah di bawah pengelolaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang sebelumnya dikelola oleh Menteri Agama secara murni. Kepres dan Inpres ini isinya dianggap melemahkan dan mengasingkan madrasah dari pendidikan nasional. Bahkan sebagian umat Islam memandang Kepres dan Inpres itu sebagai manuver untuk mengabaikan peran dan manfaat madrasah yang sejak zaman penjajahan telah diselenggarakan umat Islam¹¹.

Pada tahun 1975 pemerintah melakukan pembinaan terhadap pesantren melalui Proyek Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Dana pembinaan pesantren diperoleh dari pemerintahan terkait, dari pemerintahan pusat hingga daerah. Tahun 1975, muncul gagasan untuk mengembangkan pondok pesantren dengan model baru. Lahirlah Pondok Karya Pembangunan, Pondok Modern, Islamic Centre, dan Pondok Pesantren Pembangunan. Kemudian banyak pesantren yang mendirikan sekolah umum dengan kurikulum sekolah umum yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 1975, menetapkan mata pelajaran umum sekurang-kurangnya sebanyak 70% dari seluruh kurikulum madrasah.

Perkembangan menarik berikutnya adalah dengan terakomodasinya kepentingan-kepentingan pendidikan Islam pada khususnya dan pendidikan

¹¹ Pada awal pemerintahan orde baru, pendekatan legal formal dijalankan tidak memberikan dukungan pada madrasah. Tahun 1972 dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 1974 yang mengatur madrasah di bawah pengelolaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang sebelumnya dikelola oleh Menteri Agama secara murni

agama pada umumnya dalam UU Sisdiknas Tahun 1989. Posisi pendidikan agama dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat dilihat pada pasal 39 ayat 2 yang menyebutkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat (1) Pendidikan Pancasila, (2) Pendidikan Agama, dan (3) Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib bagi setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan mulai prasekolah (TK/RA) sampai dengan pendidikan tinggi (PT).

Kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan Islam dalam konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir 1980-an sampai dengan 1990-an. Lembaga pendidikan dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan.

Dari berbagai kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru tersebut yang berlaku sejak tahun 1966-1998, dimana kebijakan yang berubah-ubah tidak stabil, kadang menguntungkan dan kadang tidak menguntungkan perkembangan pendidikan Islam maka dapat dikatakan seperti inilah keadaan hubungan perpolitikan umat Islam dengan pemerintah Orde Baru pada masa tersebut. Menurut Restu Gunawan dapat dibagi menjadi tiga periode hubungan politik umat Islam dengan pemerintah Orde Baru, yaitu Periode Awal; Konsolidasi Dua Kekuatan (1966–1977), Periode Kedua: Fragmentasi dan Reformulasi (1977–1985), Periode Akhir; Pola Integrasi Simbiosis (1985–1998). Apakah benar tiga periode pasang surut hubungan umat Islam dengan pemerintah

orde baru tersebut mempengaruhi kebijakn pendidikan Islam? Kemudian bagaimana Lembaga Pendidikan Islam menyikapi berbagai kebijakan pendidikan Islam tersebut, terutama lembaga pendidikan di Kalimantan Selatan? Apakah ada lembaga pendidikan yang menjadi berkembang maju di Kalimantan Selatan akibat kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru? atau kah apakah ada lembaga pendidikan Islam yang terpaksa gulung tikar di Kalimantan Selatan akibat tekanan dan kebijakan pendididkan Islam oleh pemerintah Orde Baru? Kenapa ketika masa setelah Orde Baru yakni ketika Reformasi, lembaga pendidikan tumbuh menjamur dengan karakteristik beragam?.

Dari beberpa pertanyaan diatas, tentu banyak sekali kajian yang harus dilakukan terhadap perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Baru, terutama di Kalimantan Selatan, dan kebijakan pendidikan Islam pada masa orde baru. Dari hasil kajian tersebut, tentunya akan menjadi modal besar bagi lembaga pendidikan Islam kedepannya dalam memprediksi masa depan pendidikan Islam. Untuk mengetahui apa yang terjadi terhadap masa depan, maka tentu analisis masa lalu dan sekarang akan menjadi hal yang sangat tepat untuk menghasilkan prediksi masa depan.

Dari sini dapat dipahami jika sejarah pendidikan masa lalu banyak sekali manfaatnya, begitu pula dengan penelitian sejarah pendidikan, di antaranya sebagai khazanah keilmuan pendidikan Islam dan sebagai pelajaran dalam pengembangan keilmuan pendidikan Islam ke depannya. Namun jika kita menilik pada cendikiawan muslim lokal, maka sangat minim perhatiannya terhadap Penelitian Sejarah terutama Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan, dimana

kebanyakan data penelitian yang pernah dilakukan adalah oleh sarjana-sarjana Belanda sehingga kita melihat banyak data sejarah pendidikan di Kalimantan Selatan dari peneliti Belanda. Kemudian penelitian yang dilakukan hanya berkutat pada masa yang jauh, berkisaran sebelum kemerdekaan yakni ketika Belanda masih di Indonesia, setelah kemerdekaan, terlihat tidak ada perhatian terhadap penelitian sejarah pendidikan Islam, jika hal ini dibiarkan terus, semakin jauh waktu sejarah, maka akan sulit memverifikasi data. Sehingga perlunya penelitian sejarah pendidikan Islam di Kalimantan Selatan pada waktu pasca kemerdekaan.

Berdasarkan hasil observasi awal, melalui data Kantor Wilayah Kementerian Keagamaan Kalimantan Selatan, ada beberapa lembaga pendidikan Islam yang sudah ada pada masa awal Orde Baru, adapun data tersebut dalam tabel di bawah ini.

TABEL 1.1
DATA JUMLAH BERDIRINYA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
DI KALIMANTAN SELATAN

| NO | JENIS LEMBAGA | | PENJAJAHAN BELANDA/JEPANG (- 1944) | ORDE LAMA (1945- 1964) | ORDE BARU (1965- 1998) | REFORMASI (1989- SEKARANG) | TOTAL LEMBAGA SAMPAI 2017 |
|----|---------------|------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | MADRASAH | RA | - | - | 57 | 267 | 324 |
| | | MI | 3 | 26 | 263 | 231 | 523 |
| | | MTS | - | 3 | 154 | 173 | 332 |
| | | MA | - | 1 | 56 | 97 | 154 |
| 2 | PESANTREN | PONTREN UMUM | 3 | 5 | 102 | 98 | 208 |
| | | PONTREN WAJAR | - | - | - | 106 | 106 |
| | | DINIYAH | 5 | 46 | 246 | 242 | 539 |
| 3 | LPQ | TPA/RTQ | 1 | 2 | 671 | 1380 | 2054 |

Untuk mengetahui lebih jauh tentang sejarah pendidikan Islam di Kalimantan Selatan yakni masyarakat Banjar, terutama pada masa Orde Baru, dan mengingat pentingnya penelitian ini karena semakin ditunda penelitian ini akan mengakibatkan hilangnya sumber informasi, seperti saksi hidup dan dokumen-dokumen yang tidak bisa bertahan lama dan karena begitu bermanfaatnya penelitian ini sebagai modal untuk memprediksi dan menganalisis serta sebagai pelajaran untuk pendidikan Islam kedepannya maka perlu diadakan penelitian lebih mendalam. Oleh karena itu, dengan berlatar belakang dari permasalahan di atas maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam sebuah disertasi yang berjudul "**LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI KALIMANTAN SELATAN PADA MASA ORDE BARU**". Peneliti memilih pada masa orde baru¹², karena pada masa ini karakteristik setralistik¹³ pada

¹² Orde Baru adalah masa pemerintahan di Indonesia sejak 11 Maret 1966 hingga terjadinya peralihan kepresidenan, dari Presiden Suharto ke Presiden Habibie pada 21 Mei 1998. Setelah PKI berhasil dilarang, pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Suharto langsung mengadakan pembaharuan dan pembangunan di berbagai bidang termasuk pendidikan. Ketetapan MPRS XXVII/Tap/MPRS/1966 menyatakan tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dipikirkan usaha-usaha pembaharuan pendidikan. Sejak tahun 1959, Indonesia berada di bawah gelora manipol (manifesto Politik)-USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Manipol-USdek menjadi "dewa" dalam kehidupan politik dan semua bidang kehidupan termasuk di dalam bidang pendidikan. Keputusan Presiden Nomor 145 tahun 1965, tujuan nasional pendidikan zaman Orde Lama sesuai dengan manipol-USDEK. Tujuan pendidikan yang diterapkan yaitu Panca Wardana (lima pokok perkembangan). Tujuan pendidikan ini tidak berlangsung lama dan ditinggalkan setelah meletusnya peristiwa G 30/S/PKI pada tahun 1965. Masyarakat mulai sadar bahwa adamsud politik PKI yang tercantum dalam tujuan pendidikan tersebut dengan menggunakan Pancasila sebagai tamengnya. Dikeluarkannya ketetapan MPRS Nomor XXVII tahun 1966 menghapus Keputusan Presiden Nomor 145 tahun 1965 dan Penetapan Presiden Nomor 19 tahun 1965 tentang pokok sistem pendidikan nasional Pancasila dinyatakan tidak berlaku lagi.

¹³ Orde Baru memberikan corak baru bagi kebijakan pendidikan Agama Islam, karena beralihnya pengaruh komunisme ke arah pemurnian Pancasila melalui rencana pembangunan nasional berkelanjutan. Masa Orde Baru disebut juga sebagai Orde Konstitusional dan Orde Pembangunan. Yakni bertujuan membangun manusia seutuhnya dan menyeimbangkan antara rohani dan jasmani untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, dalam Pelita IV di bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan.

kebijakan pendidikan pemerintah akan memberikan hal yang berbeda pada dunia pendidikan Islam, seperti apa dan bagaimana. Hal tersebut akan menjadi bagian yang perlu diketahui dalam mendeskripsikan perkembangan lembaga pendidikan di masyarakat Banjar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan agar penelitian ini lebih terarah maka peneliti menetapkan fokus masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan pada masa Orde Baru Awal 1966-1974?
2. Bagaimana Tantangan Lembaga Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan pada masa Orde Baru Awal 1966-1974?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan fokus masalah yang telah dikemukakan maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui bagaimana Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan pada masa Orde Baru Awal 1966-1974.
2. Mengetahui bagaimana Tantangan Lembaga Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan pada masa Orde Baru Awal 1966-1974.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari berbagai pihak, di antaranya adalah:

1. Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi pemerhati sejarah, pendidikan agama Islam yang ada di Kalimantan Selatan.
2. Sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi para peneliti berikutnya yang ingin meneliti masalah ini lebih luas dan mendalam lagi.
3. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti khususnya tentang sejarah lembaga pendidikan Islam pertama di Kalimantan Selatan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari multi tafsir dalam judul disertasi ini, maka peneliti mempertegas judul penelitian dalam definisi operasional sebagai berikut:

1. Lembaga Pendidikan Islam

Secara etimologi, lembaga adalah asal sesuatu, acuan, sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan untuk mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukan sesuatu usaha.¹⁴ Dalam bahasa Inggris, lembaga disebut *institute* (dalam pengertian fisik), yaitu sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan lembaga dalam pengertian non fisik atau abstrak disebut *institution*, yaitu suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Lembaga dalam pengertian fisik disebut juga dengan bangunan, dan lembaga dalam pengertian non fisik disebut dengan pranata.

¹⁴ Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 367

Secara terminologi dari kutipan Ramayulis oleh Hasan Langgulung, bahwa lembaga pendidikan adalah suatu sistem peraturan yang bersifat abstrak, suatu konsepsi yang terdiri dari kode-kode, norma-norma, ideologi-ideologi dan sebagainya, baik tertulis atau tidak, termasuk perlengkapan material dan organisasi simbolik: kelompok manusia yang terdiri dari individu-individu yang dibentuk dengan sengaja atau tidak, untuk mencapai tujuan tertentu dan tempat tempat kelompok itu melaksanakan peraturan-peraturan tersebut adalah: masjid, sekolah, kuttab dan sebagainya.¹⁵

Ditinjau dari aspek penanggung jawab, lembaga pendidikan Islam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu : 1. Lembaga Pendidikan Islam Informal (Keluarga), 2. Lembaga Pendidikan Islam Formal (Sekolah/Madrasah), 3. Lembaga Pendidikan Islam Non Formal (Masyarakat/pesantren/Diniyah/masjid dll).

Adapun lembaga pendidikan Islam yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah lembaga pendidikan Islam dalam bentuk Pondok Pesantren dan Madrasah Aliyah serta fokus pada kajian kelembagaannya bagaimana bagaimana lembaga pendidikan Islam berdiri dan tutup, perubahannya status lembaganya, bertambah dan berkurangnya tingkatan lembaganya.

2. Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas 37.530,52 km² dengan populasi hampir 3,7 juta jiwa. Provinsi ini mempunyai 11 kabupaten dan 2 kota.

¹⁵ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2002), hlm. 277

3. Orde Baru

Orde Baru adalah masa pemerintahan di Indonesia sejak 11 Maret 1966 hingga terjadinya peralihan kepresidenan, dari Presiden Soeharto ke Presiden Habibie pada 21 Mei 1998. Setelah PKI berhasil dilarang, pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto langsung mengadakan pembaharuan dan pembangunan di berbagai bidang termasuk pendidikan. Ketetapan MPRS XXVII/Tap/MPRS/1966 menyatakan tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dipikirkan usaha-usaha pembaharuan pendidikan. Sejak tahun 1959, Indonesia berada di bawah gelora manipol (manifesto politik)-USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Manipol–Usdek menjadi “dewa” dalam kehidupan politik dan semua bidang kehidupan termasuk di dalam bidang pendidikan. Keputusan Presiden Nomor 145 tahun 1965, tujuan nasional pendidikan zaman Orde Lama sesuai dengan manipol-USDEK. Tujuan pendidikan yang diterapkan yaitu Panca Wardana (lima pokok perkembangan). Tujuan pendidikan ini tidak berlangsung lama dan ditinggalkan setelah meletusnya peristiwa G 30/S/PKI pada tahun 1965. Masyarakat mulai sadar bahwa ada maksud politik PKI yang tercantum dalam tujuan pendidikan tersebut dengan menggunakan Pancasila sebagai tamengnya. Dikeluarkannya ketetapan MPRS Nomor XXVII tahun 1966 menghapus Keputusan Presiden Nomor 145 tahun 1965 dan Penetapan Presiden Nomor 19 tahun 1965 tentang pokok sistem pendidikan nasional Pancasila dinyatakan tidak berlaku lagi.

Adapun masa Orde Baru yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah Orde Baru awal, yakni pada tahun 1965 sampai 1974.

Dari penegasan judul ini, yang perlu di perjelas adalah penelitian yang akan peneliti lakukan pada lembaga pendidikan Islam pada mas Orde Baru awal, yakni penelitian tentang lembaga pendidikan Islam dalam bentuk Pondok Pesantren dan Madrasah Aliyah pada tahun 1965 sampai 1974 yang ada di Kalimantan Selatan.

TABEL 1.2
DATA JUMLAH BERDIRINYA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
PADA MASA ORDE BARU DI KALIMANTAN SELATAN

| No | Jenis Lembaga | | Orde Baru Awal (1966-1974) | Orde Baru Pertengahan (1975-1988) | Orde Baru Akhir (1989-1998) | Total Orde Baru (1965-1988) |
|----|---------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Madrasah | RA | - | 5 | 52 | 57 |
| | | MI | 16 | 84 | 161 | 263 |
| | | MTs | 9 | 47 | 98 | 154 |
| | | MA | 4 | 17 | 35 | 56 |
| 2 | Pesantren | Pontren Umum | 8 | 43 | 51 | 102 |
| | | Pontren Wajar | - | - | - | - |
| | | Diniyah | 43 | 136 | 70 | 246 |
| 3 | LPQ | TPA/RTQ | - | 46 | 625 | 671 |

Dari data di atas dapat diketahui jumlah Pondok Pesantren yang berdiri pada kisaran tahun 1966-1974 ada delapan Pondok Pesantren, sedangkan yang sudah berdiri sebelum tahun 1965 atau pada masa orde lama ada delapan Pondok Pesantren. Sedangkan Madrasah Aliyah yang berdiri pada kisaran tahun 1966-

1974 ada empat Madrasah Aliyah, sedangkan yang sudah berdiri sebelum tahun 1965 atau pada masa orde lama ada satu Pondok Pesantren.

Adapun data Pondok Pesantren dan Madrasah Aliyah tersebut sebagaimana tabel di bawah ini.

TABEL 1.3
DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM YANG DITELITI
PONDOK PESANTREN YANG TELAH BERDIRI SEBELUM TAHUN
1975

| No | Nama Pondok Pesantren | Tahun Berdiri | Alamat | Desa | Kec. | Kabupaten |
|----|---|---------------|---|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | Darussalam | 1914 | Jln. Kh. Kasyful Anwar Kel. Pasayanan | Pasayanan | Martapura | Banjar |
| 2 | Rasyidiyah Khalidiyah | 1922 | Jl. Rakha Po.Box (102) Amuntai 71471 | Pakapuran | Amuntai Utara | Hulu Sungai Utara |
| 3 | Syekh Muhammad Arsyad Albanjari | 1931 | Dalampagar Ulu Rt 02 No 79 Martapura Timur | Dalampagar | Martapura Timur | Banjar |
| 4 | Nurul Fajeri | 1950 | Nurul Fajeri Jln Sirajul Huda Jingah Bujur Rt 01 N0 13 Kec.Haur Gading Kab.Hsu | Jingah Bujur | Haur Gading | Hulu Sungai Utara |
| 5 | Ibnul Amin Putera | 1958 | Desa Pamangkih | Pamangkih | Labuan Amas Utara | Hulu Sungai Tengah |
| 6 | Ibnul Amin Puteri (Dzuriat Kh. Mahfuz Amin) | 1958 | Desa Pamangkih | Pamangkih | Labuan Amas Utara | Hulu Sungai Tengah |
| 7 | Darussalam | 1963 | Jalan Masjid Darul Abrar Rt. 02 Desa Awayan Hilir | Awayan | Awayan | Balangan |
| 8 | Pendidikan Islam Parigi | 1964 | Jl. Pelayar No.111 Habirau Tengah | Habirau Tengah | Daha Selatan | Hulu Sungai Selatan |
| 9 | Muro`atushshibyan | 1966 | Jl. Dalam Pagar Kamasan Rt.02 No.43 Desa Dalam Pagar | Dalam Pagar | Martapura Timur | Banjar |
| 10 | Al-Ikhlash | 1967 | Jl. Mandala | Sungai Mandala | Daha Utara | Hulu Sungai |

| | | | | | | |
|----|-------------------|------|---|--------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | Selatan |
| 11 | Darussalam | 1967 | Jl. Brigjen. H. Hasan Basri Km.6 Muara Tapus | Muara Tapus | Amuntai Tengah | Hulu Sungai Utara |
| 12 | Darul Ulum | 1967 | Jl. Brigjend H. Hasan Basri Rt.01 No.031 Kembang Kuning | Kembang Kuning | Amuntai Tengah | Hulu Sungai Utara |
| 13 | Darul Hikmah | 1967 | Jl. Suka Ramai No 103 Rt 03 Desa Danau Panggang | Danau Panggang | Danau Panggang | Hulu Sungai Utara |
| 14 | Tarbiyatuddiniyah | 1968 | Desa Buas-Buas Rt. 003 Rw. 002 | Buas-Buas | Candi Laras Utara | Tapin |
| 15 | Assunniyyah | 1968 | Jl. Ahmad Yani Km 104 | Buas-Buas Hilir | Tapin Selatan | Tapin |
| 16 | Ubudiyah | 1971 | Jl. Pesantren Rt.07 Rw.02 Desa Padang | Padang | Bati - Bati | Tanah Laut |

TABEL 1.3

**DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM YANG DITELITI
MADRASAH ALIYAH YANG TELAH BERDIRI SEBELUM TAHUN 1975**

| No | Nama Madrasah | | Tahun Berdiri | Alamat | Desa | Kec. | Kabupaten |
|----|---------------|------------------|---------------|--|---------------|---------------|--------------------|
| 1 | MAS | Muallimin Alabio | 01/08/1960 | Jln. polder Rt.1 No.11 Pandulangan | Pandulangan | Sungai Pandan | Hulu Sungai Utara |
| 2 | MAN | Kelua | 07/06/1968 | Jl. Baco No. 63 | Pudak Setegal | Kelua | Tabalong |
| 3 | MAN | Tanjung | 06/07/1968 | Jl. Ir.p.h.m.noor Rt 10 N0 23 | Sulingan | Murung Pudak | Tabalong |
| 4 | MAN | 1 Barabai | 26/09/1970 | Jl. H. Damanhuri Komplek Mesjid Agung Riadusshalihin Barabai | Barabai Timur | Barabai | Hulu Sungai Tengah |
| 5 | MAN | 2 Paringin | 17/01/1971 | Jl Sutera Ali Adul | Hamparaya | Batu Mandi | Balangan |

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian secara spesifik yang berkaitan dengan Lembaga Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan pada masa Orde Baru belum ada peneliti temukan, mungkin karena memang tidak ada atau mungkin karena memang peneliti belum menemukannya. Namun disini peneliti telah melakukan observasi awal dari hasil penelitian, jurnal, dan buku-buku baik secara lokal, nasional, maupun internasional dan peneliti tidak menemukannya. Sehingga dalam penelitian terdahulu ini, peneliti hanya mengemukakan berbagai penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan tema penelitian dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun penelitian tersebut adalah:

- 1. Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Banjar (Abad Ke-18)**, oleh Mila Hasanah, dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin, hasil penelitian ini menyatakan bahwa pendidikan Islam pada masa Kerajaan Banjar (abad ke-18), sangat erat kaitannya dengan masuknya Islam di Kalimantan Selatan dan kondisi sosial politik kerajaan Banjar pada waktu itu. Abad ke-18 merupakan zaman keemasan Kerajaan Banjar, karena pada masa itu terjadi puncak perkembangan Islam di Kalimantan Selatan. Kegiatan Pendidikan bpusat pada mesjid, langgar dan rumah dengan sistem non klasikal. Dasar pendidikan yaitu Alquran, Hadis, *ijtihad* ulama lokal dan titah raja.
- 2. Jaringan Intelektual Ulama Banjar Abad XIX da XX (Studi Tentang Proses, Pola dan Ekspansi Jaringan)**, oleh Rahmadi, dkk, dosen IAIN Antasari Banjarmasin, di terbitkan oleh Pusat Penelitian IAIN Antasari Banjarmasin 2009. Penelitian ini mencoba mengeksplorasi secara luas tentang

jaringan ulama Banjar yang terbentuk pasca Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, lebih khusus bagaimana peta, proses, pola dan ekspansi jaringan intelektual ulama Banjar pada abad ke-19 dan abad ke-20. Hasil penelitian ini yaitu ada tiga jaringan intelektual yang terbentuk, pertama jaringan intelektual ulama Banjar keturunan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

3. Jaringan ulama Pendiri dan Pimpinan Pondok Pesantren di Kalimantan

Selatan, oleh Ahdi Makmur dkk, dosen IAIN Antasari Banjarmasin, di terbitkan oleh Pusat Penelitian IAIN Antasari Banjarmasin 2005. Penelitian ini mendeskripsikan sarana inti.

4. Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru, oleh Heni Yuningsih, dosen

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dipublikasikan oleh Jurnal Tarbiya Vol 1, No 1. *Dalam Jurnal tersebut dikemukakan bahwa Pendidikan Islam masa Orde Baru setahap demi setahap mengalami perkembangan di antaranya lembaga-lembaga pesantren mulai mendirikan madrasah dalam sistem.*¹⁶

5. *The Islamization of Southern Kalimantan: Sufi Spiritualism, Ethnic Identity,*

Political Activism, oleh Ian Chalmers, di publikasikan dalam *Studia Islamika*, tahun 2007. Dalam tulisan ini dipaparkan bahwa perubahan komposisi etnis dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap redanya ketegangan antara Islam nonortodoks seperti tasawuf dan tarekat, dengan Islam universal yang lebih ortodoks. Pada saat yang sama, wajah Islam universal di Kalimantan

¹⁶ Heni Yuningsih, "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru," *Jurnal TARBIYA* 1, no. 1 (2015): 175–94.

Selatan pun menjadi semakin menonjol, dan secara perlahan namun pasti menenggelamkan afinitas etnisnya dengan Banjar.¹⁷

6. Tipologi Konsep Kurikulum Pesantren di Kalimantan Selatan, oleh Syaifuddin Sabda, dosen IAIN Antasari Banjarmasin, di terbitkan oleh Pusat Penelitian IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2000¹⁸.

7. Dinamika Intelektual Islam di Kalimantan Selatan: Studi Genealogi, Referensi, Dan Produk Pemikiran, oleh Rahmadi Dosen IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2016. Dipublikasikan oleh jurnal Usuluddin. Dalam jurnal ini dikemukakan dinamika intelektual Islam yang berlangsung di Kalimantan Selatan tidak lepas dari dinamika intelektual Islam yang berlangsung di Timur Tengah dan Nusantara secara umum. Sejumlah pengaruh luar telah membentuk intelektualisme Islam di kalangan elite muslim Banjar baik itu pengaruh Timur Tengah (Haramain, Mesir dan Hadramaut) maupun Nusantara sendiri (Aceh dan Jawa). Beberapa pengaruh ini telah masuk sejak abad abad ke-16, yakni pada masa Islamisasi awal masyarakat Banjar. Di samping pengaruh luar, pengaruh internal juga turut memberikan kontribusi besar bagi dinamika intelektual Islam di Kalimantan Selatan dengan hadirnya karya-karya Al-Banjari dan keturunannya. Bahkan, karya-karya Al-Banjari dan aktivitas

¹⁷ Ian Chalmers, "The Islamization of Southern Kalimantan: Sufi Spiritualism, Ethnic Identity, Political Activism," *Studia Islamika, Indonesian Journal of Islamic Studies* 14, no. 3 (2007): 371–417.

¹⁸ Syaifuddin Sabda, Pusat Penelitian IAIN Antasari Banjarmasin, "Tipologi Konsep Kurikulum Pesantren Di Kalimantan Selatan," *Laporan Rendition*, 2000.

keturunannya turut mempengaruhi dinamika intelektual di Nusantara bahkan di Asia Tenggara.¹⁹

8. Islam di Kalimantan Selatan Dilihat dari Perspektif Politik dan Pemerintahan, oleh Nor Wahidah, yang dipublikasikan dala jurnal *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 1 tahun 2009. Dalam jurnal tersebut dipaparkan bahwa setelah kemerdekaan pada tahun 1945, kiprah umat Islam di dalam dunia politik di Kalimantan Selatan disalurkan pada partai-partai Islam, yang pada pemilu tahun 1955 dimenangkan oleh Nahdatul Ulama dan Masyumi, sedangkan pada pemilu-pemilu berikutnya yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 perolehan suara partai Islam yang diwakili oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terutama sejak tahun 1987 sedikit demi sedikit penurunan, yang sebabnya diasumsikan karena Umat Islam kurang peduli terhadap arti penting peran politik pengembangan Islam dan kurang aspiratifnya figur-figur yang mengendalikan terhadap kebutuhan riil umat Islam dan rendahnya komitmen terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.²⁰

9. Kiprah Al-Washliyah di Kalimantan Selatan di Bidang Pendidikan, oleh Sarmiji Aseri and Abu Bakar, dipublikasikan *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 2 tahun 2010. Dalam jurnal ini dipaparkan Perkembangan Al-Wasliyah dan beberapa lembaga pendidikan di Kalimantan

¹⁹ Rahmadi, "Dinamika Intelektual Islam Di Kalimantan Selatan: Studi Genealogi, Referensi, Dan Produk Pemikiran," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 11, no. 1 (March 7, 2016): 1–19, doi:10.18592/jiu.v11i1.730.

²⁰ Nor Wahidah, "Islam Di Kalimantan Selatan Dilihat Dari Perspektif Politik dan Pemerintahan," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (May 12, 2009), doi:10.18592/al-banjari.v8i1.901.

Selatan terutama di Banjarmasin, Martapura, dan HST serta dipaparkan mengenai metode Fatwa Dewan Fatwa Al Washliyah dan aplikasinya.²¹

10. Lembaga Pendidikan Muhammadiyah di Kalimantan Selatan, oleh Mahyuddin Barni, di publikasikan dalam jurnal *Al-Banjari* 2010. Dalam jurnal ini dideskripsikan tentang Muhammadiyah di Kalimantan Selatan, dimana Muhammadiyah berdiri secara resmi pada tahun 1925 di Alabio. Kehadiran Muhammadiyah di Alabio diikuti dengan pendirian Sekolah Muhammadiyah pada tahun 1926. Sejak itu, Sekolah Muhammadiyah bermunculan bersamaan dengan lahirnya Cabang Muhammadiyah di seluruh Kalimantan Selatan. Sampai saat ini, Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah telah berdiri di semua kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Organisasi ini di Kalimantan telah memiliki sejumlah sekolah, madrasah dan pendidikan tinggi²²

11. Paradigma Bermazhab Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan, oleh Sukarni Sukarni, dipublikasikan dalam jurnal *MIQOT* 2015. Hasil penelitian ini, menyebutkan bahwa di dalam pembelajaran fikih, baik yang diselenggarakan melalui sistem klasikal atau nonklasikal, *bandongan/wetonan*, ceramah dan atau diskusi, pelembagaan mazhab terlihat pada bahan ajar/kitab fikih yang digunakan dan konsep serta paradigma guru

²¹ Sarmiji Aseri and Abu Bakar, "Kiprah Al-Washliyah di Kalimantan Selatan di Bidang Pendidikan," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (October 13, 2010), <http://jurnal.iain-antasari.ac.id/index.php/al-banjari/article/view/805>.

²² Mahyuddin Barni, "Lembaga Pendidikan Muhammadiyah di Kalimantan Selatan," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (October 13, 2010), <http://jurnal.iain-antasari.ac.id/index.php/al-banjari/article/view/803>.

tentang mazhab. Hal tersebut berimplikasi pada terciptanya alumni yang eksklusif dalam memahami dan menyikapi perbedaan pendapat.²³

12. Peranan Perempuan Banjar Dalam Pendidikan Islam Abad XIX dan XX,

oleh Salasiah di publikasikan IAIN ANTASARI PRESS tahun 2014. Hasil penelitian yang di bukukan ini menyimpulkan bahwa Masyarakat Banjar yang berpaham patriarki bisa menerima kenyataan bahwa perempuan mempunyai hak yang sama di berbagai bidang (kesetaraan gender). Demokrasi pendidikan di Kalimantan Selatan telah memberikan akses yang sama antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan, dan dalam hak mendapatkan pelajaran (peserta didik) serta pengajaran. Kemudian Perempuan Kalimantan Selatan zaman sekarang telah menunjukkan kemampuan dan kecerdasannya di berbagai bidang, baik politik, ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Terutama bidang pendidikan, profesi ini begitu banyak diminati para perempuan Banjar. Kepemilikan berbagai bentuk yayasan pendidikan telah banyak mereka dimiliki. Mereka mengambil andil serta ikut bertanggung jawab dalam pendidikan di Kalimantan Selatan.²⁴

²³ Sukarni Sukarni, "Paradigma Bermazhab Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan," *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 39, no. 1 (June 9, 2015), <http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/40>.

²⁴ Salasiah Salasiah, *Peranan Perempuan Banjar Dalam Pendidikan Islam Abad XIX dan XX* (IAIN Antasari Press, 2014), <http://idr.iain-antasari.ac.id/5233/>.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memahami pembahasan ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut :

- BAB I. Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.
- BAB II. Sejarah lahirnya lembaga pendidikan Islam di Kalimantan Selatan yang terdiri atas masuknya Islam di Kalimantan Selatan, pengertian lembaga pendidikan Islam dan proses berdirinya, fase-fase perkembangan lembaga pendidikan Islam di Kalimantan Selatan, dan tokoh pendiri lembaga pendidikan Islam di Kalimantan
- BAB III. Lembaga Pendidikan di Kalimantan Selatan Tahun pada masa Orde Baru: awal aktivitas lembaga pendidikan Islam di Kalimantan Selatan, berisi tentang aktivitas lembaga pendidikan di Kalimantan Selatan pada masa Orde Baru.
- BAB IV. Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan pada masa Orde Baru, fungsi dan peranan lembaga pendidikan Islam di Kalimantan Selatan pada masa Orde Baru, dan Analisis tentang lembaga pendidikan Islam di Kalimantan Selatan pada masa Orde Baru.
- BAB V. Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.